

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelayanan perizinan yang dijalankan oleh BP Batam melalui Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ditpam telah menunjukkan efektivitas yang kuat dalam mendukung pembangunan Rempang Eco City. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret terkait dengan harmonisasi regulasi, integrasi sistem data, dan penguatan koordinasi antarinstansi. Implementasi regulasi yang konsisten dan efektif dalam pengembangan Rempang Eco City menunjukkan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan lebih lancar jika ada koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Penyusunan regulasi yang jelas dan terintegrasi antara pusat dan daerah, serta penggunaan sistem perizinan berbasis teknologi seperti OSS dan IBOSS, mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit. Penguatan sistem dan teknologi, yang diikuti dengan pelatihan petugas pelayanan publik, berperan besar dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas perizinan.

Selanjutnya, keberhasilan pengembangan kawasan Rempang Eco City bergantung pada partisipasi masyarakat. BP Batam telah melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi, memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan terkait pembangunan memperhatikan kepentingan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam tim terpadu, pemberdayaan masyarakat lokal, serta

memberikan kompensasi berupa tanah dan hunian dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), BP Batam menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan publik. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

Akhirnya, penerapan regulasi yang harmonis dan transparan dalam pengembangan Rempang Eco City mengarah pada pembangunan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil. Berdasarkan pengamatan, pengelolaan perizinan yang efisien, akurat, dan tepat waktu, serta pemberdayaan masyarakat dalam seluruh proses, menjadi faktor kunci yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, pendekatan BP Batam yang berbasis pada kepatuhan regulasi, penggunaan teknologi, dan keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Rempang Eco City.

4.2 Saran

1. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan forum koordinasi untuk menyusun regulasi yang lebih teknis dan operasional. Langkah pertama yang bisa diambil adalah membentuk tim teknis lintas sektoral yang melibatkan perwakilan dari kementerian terkait (seperti Kementerian Dalam Negeri, BPN, KLHK) serta BP Batam. Tim ini bertugas untuk merumuskan regulasi turunan yang lebih jelas, menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah, serta memitigasi potensi tumpang tindih kewenangan. Dengan regulasi yang lebih harmonis, baik investor maupun

masyarakat lokal akan lebih mudah mengakses informasi dan menjalankan proses perizinan tanpa hambatan hukum yang tumpang tindih atau kebijakan yang kontradiktif.

2. BP Batam dan pemerintah daerah perlu memprioritaskan pengembangan sistem digital berbasis cloud yang dapat mengintegrasikan data dari berbagai instansi terkait. Sistem ini harus memungkinkan akses real-time dan langsung antara BPN, KLHK, Pemda, dan BP Batam. Pengembangan *dashboard* nasional yang menggabungkan data mengenai perizinan, kepemilikan lahan, dan status lingkungan akan mempermudah seluruh pihak terkait dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan secara cepat dan akurat. Hal ini akan mengurangi tumpang tindih informasi serta memastikan bahwa semua data yang digunakan dalam proses perizinan adalah valid dan mutakhir, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakadilan sosial akibat kesalahan atau kekurangan data.
3. BP Batam dan pemerintah daerah harus menyusun dan mengimplementasikan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang jelas, terukur, dan mudah dipahami oleh semua petugas pelayanan publik. SOP ini harus mencakup prosedur yang terperinci mengenai setiap tahapan perizinan, syarat yang harus dipenuhi, serta waktu yang dibutuhkan untuk setiap proses. Panduan ini akan meminimalkan ketidakpastian yang sering terjadi dalam proses birokrasi, mempercepat pengurusan izin, dan mempermudah masyarakat serta investor dalam memahami dan mengikuti prosedur yang ada. Dengan SOP yang jelas, baik petugas pelayanan

maupun masyarakat akan memiliki pemahaman yang sama mengenai proses perizinan, yang pada akhirnya akan menciptakan proses yang lebih transparan dan mengurangi potensi ketidakadilan sosial.